

ADMINISTRASI, PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN PILKADES DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Azharisman Rozie^{1*}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl Raya Jatinangor KM.20, Sumedang, Indonesia

Korespondensi: hhrozie@ipdn.ac.id

Jurnal Politikologi: volume 4 nomor 1 Tahun 2023.

ABSTRAK

Pengelolaan pemerintahan desa yang efektif membutuhkan kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi administrasi, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap keempat aspek tersebut, sehingga diperlukan penguatan kapasitas secara sistematis dan aplikatif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kabupaten Bandung Barat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui need assessment, ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi mencakup tata administrasi desa, penyusunan RPJMDes dan RKPDes, pengelolaan APBDDes, serta mekanisme Pilkades yang demokratis dan sesuai regulasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh materi yang diberikan. Peserta mampu memahami pentingnya administrasi yang tertib, perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta penyelenggaraan Pilkades yang demokratis. Kegiatan juga meningkatkan kesadaran dan motivasi aparatur untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung profesionalisme aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan serta pembangunan desa.

Kata kunci: administrasi desa; perencanaan pembangunan; keuangan desa; Pilkades; kapasitas aparatur.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintahan desa yang efektif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam aspek administrasi, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pemahaman terhadap mekanisme pemilihan kepala desa (pilkades) yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui kegiatan sosialisasi yang komprehensif dan aplikatif.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai manajemen pemerintahan desa yang mencakup empat aspek utama, yaitu administrasi

desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta tata kelola pilkades. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa dan pemangku kepentingan terkait mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan desa secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang secara partisipatif dan aplikatif untuk memastikan efektivitas transfer pengetahuan kepada aparatur desa dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui identifikasi kebutuhan (need assessment) guna memetakan permasalahan aktual dalam pengelolaan administrasi, perencanaan pembangunan, keuangan desa, serta pelaksanaan pilkades. Selanjutnya, dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan regulasi terkini dan konteks lokal desa.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktik. Pada sesi administrasi desa, peserta diberikan pemahaman mengenai tata naskah dinas dan pengarsipan. Pada aspek perencanaan, difokuskan pada penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDDes secara partisipatif. Sementara itu, pada pengelolaan keuangan desa, disampaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBDes. Adapun pada materi pilkades, dibahas mekanisme pelaksanaan yang demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta umpan balik peserta untuk mengukur tingkat pemahaman dan efektivitas kegiatan. Dengan metode ini, diharapkan kegiatan PKM mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Konsep Umum Manajemen Pemerintahan Desa (Administrasi, Perencanaan, Keuangan, dan Pilkades)” dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur desa, perangkat desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui

pendekatan partisipatif dengan mengombinasikan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, ditemukan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai konsep dasar manajemen pemerintahan desa, khususnya terkait administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, tata kelola keuangan desa, dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades). Keterbatasan tersebut terlihat dari hasil pre-test yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, masih ditemukan persepsi bahwa administrasi desa hanya sebatas pencatatan surat-menyurat, padahal administrasi desa mencakup keseluruhan sistem pengelolaan dokumen pemerintahan, pelayanan publik, dan pengarsipan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada sesi administrasi desa, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya tata naskah dinas, pengelolaan arsip, pencatatan administrasi kependudukan, serta sistem dokumentasi pemerintahan desa yang tertib dan sistematis. Materi ini mendapatkan respons yang sangat positif karena banyak peserta mengakui bahwa selama ini pengelolaan administrasi masih dilakukan secara konvensional dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar administrasi pemerintahan yang baik. Melalui diskusi dan studi kasus, peserta mulai memahami pentingnya administrasi desa sebagai instrumen utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai penyusunan dokumen administrasi desa. Aparatur desa mulai memahami pentingnya klasifikasi surat, sistem pengarsipan, penyusunan buku administrasi desa, serta pencatatan kegiatan pemerintahan secara berkala. Dalam sesi praktik, peserta diberikan contoh penyusunan dokumen administrasi dan simulasi pengarsipan yang sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan desa. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap kemampuan teknis aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan secara lebih profesional.

Pada aspek perencanaan pembangunan desa, kegiatan PKM berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sebagian peserta menganggap bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) hanya merupakan kewajiban administratif semata. Namun setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa dokumen perencanaan merupakan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan desa secara berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi, peserta diberikan pemahaman mengenai tahapan penyusunan RPJMDes dan RKPDes, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan aspirasi masyarakat, penentuan prioritas pembangunan, hingga penyusunan program dan kegiatan yang realistis sesuai kapasitas desa. Peserta juga dilatih untuk memahami keterkaitan antara visi kepala desa dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Melalui pendekatan partisipatif, peserta mulai menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan agar program pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran aparat desa terhadap pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan desa dengan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemahaman ini dinilai penting karena banyak desa mengalami kendala dalam implementasi pembangunan akibat ketidaksesuaian antara program desa dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih luas. Dengan adanya sosialisasi ini, peserta mulai memahami bahwa perencanaan desa tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi harus terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pada aspek pengelolaan keuangan desa, kegiatan PKM memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan APBDes. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masih terdapat aparat desa yang belum memahami secara detail tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan administratif maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Melalui kegiatan sosialisasi, peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme penyusunan APBDes yang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan publik. Peserta juga diperkenalkan pada konsep transparansi anggaran dan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam sesi studi kasus, peserta diminta untuk menganalisis contoh pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai prosedur serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini mendorong peserta untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan kemampuan dalam memahami struktur APBDes, mekanisme penggunaan dana desa, serta prosedur pelaporan keuangan desa. Selain itu, peserta mulai memahami pentingnya pengawasan internal dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang bersih dan akuntabel. Kesadaran ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan PKM karena pengelolaan

keuangan desa yang baik merupakan fondasi utama bagi terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada materi pilkades, kegiatan PKM memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta memperoleh penjelasan mengenai tahapan pilkades, mulai dari pembentukan panitia, penjaringan bakal calon, penetapan calon, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan kepala desa terpilih. Selain itu, dibahas pula berbagai potensi konflik yang sering muncul dalam pilkades serta strategi penyelesaiannya.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya netralitas panitia pilkades dan perlunya menjaga stabilitas sosial selama proses pemilihan berlangsung. Diskusi mengenai studi kasus konflik pilkades memberikan wawasan baru bagi peserta tentang pentingnya komunikasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan dalam mencegah terjadinya sengketa pemilihan. Pemahaman ini dinilai sangat penting mengingat pilkades sering menjadi momentum yang memunculkan dinamika sosial dan politik di tingkat desa.

Berdasarkan hasil post-test, terjadi peningkatan pemahaman peserta pada seluruh materi yang disampaikan. Sebagian besar peserta mampu menjelaskan kembali konsep administrasi desa, tahapan perencanaan pembangunan desa, mekanisme pengelolaan keuangan desa, serta prosedur pilkades yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta juga memberikan umpan balik positif terhadap metode pelaksanaan kegiatan yang dinilai interaktif dan mudah dipahami.

Kegiatan PKM ini juga menghasilkan peningkatan motivasi aparatur desa untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa di wilayah masing-masing. Peserta menyampaikan bahwa materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan aktual desa, terutama dalam menghadapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan komitmen aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa.

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa merupakan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara profesional.

Dalam konteks administrasi desa, hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan secara tertib dan sistematis. Kondisi ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa administrasi desa di banyak wilayah masih bersifat manual, tidak terdokumentasi dengan baik, dan belum didukung oleh sistem pengarsipan yang memadai. Padahal, administrasi desa merupakan instrumen penting dalam menjamin efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Peningkatan pemahaman peserta mengenai tata naskah dinas, pengarsipan, dan dokumentasi pemerintahan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu memberikan dampak positif terhadap kapasitas teknis aparatur desa. Administrasi yang baik akan memudahkan proses pelayanan masyarakat, pengawasan pemerintahan, serta evaluasi pembangunan desa. Selain itu, administrasi yang tertib juga dapat meminimalkan potensi konflik administratif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pada aspek perencanaan pembangunan desa, hasil kegiatan menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDDes. Perencanaan yang partisipatif memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam menentukan arah pembangunan desa sehingga program yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang bertujuan menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta masih memahami perencanaan pembangunan sebagai formalitas administratif semata. Namun setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa perencanaan merupakan proses strategis yang menentukan efektivitas pembangunan desa. Pemahaman ini sangat penting karena banyak program pembangunan desa yang tidak berjalan optimal akibat lemahnya perencanaan dan minimnya keterlibatan masyarakat.

Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun dokumen perencanaan juga memiliki implikasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran desa. Perencanaan yang baik akan membantu pemerintah desa menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat dan menghindari penggunaan anggaran yang tidak efisien. Selain itu, sinkronisasi antara perencanaan desa dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat akan memperkuat integrasi pembangunan antarlevel pemerintahan.

Dalam aspek pengelolaan keuangan desa, hasil kegiatan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi isu utama yang perlu diperkuat. Dana desa yang terus meningkat setiap tahun memberikan peluang besar bagi pembangunan desa, namun di sisi lain

juga meningkatkan risiko penyimpangan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan menjadi sangat penting.

Melalui kegiatan PKM, peserta memperoleh pemahaman mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Pemahaman ini sangat relevan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Pemerintah desa dituntut tidak hanya mampu menggunakan anggaran secara efektif, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa juga menjadi aspek penting yang dibahas dalam kegiatan ini. Pengawasan publik dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan anggaran desa. Dengan adanya keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat, pemerintah desa akan terdorong untuk mengelola keuangan secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab.

Pada aspek pilkades, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai mekanisme demokrasi lokal masih perlu diperkuat. Pilkades tidak hanya merupakan proses politik untuk memilih kepala desa, tetapi juga menjadi bagian penting dari demokratisasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkades harus dilakukan secara transparan, jujur, dan adil agar menghasilkan kepemimpinan desa yang legitimate dan dipercaya masyarakat.

Diskusi mengenai potensi konflik pilkades menunjukkan bahwa dinamika politik di tingkat desa sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, kekerabatan, dan kepentingan kelompok tertentu. Dalam kondisi seperti ini, netralitas panitia dan kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial. Kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman kepada peserta bahwa pilkades yang demokratis bukan hanya ditentukan oleh hasil pemungutan suara, tetapi juga oleh proses yang berlangsung secara adil dan transparan.

Hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan aplikatif dalam PKM mampu meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan kepada peserta. Metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus memberikan ruang bagi peserta untuk memahami materi secara lebih mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyampaian satu arah karena peserta dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Selain meningkatkan pemahaman teknis, kegiatan PKM juga berkontribusi terhadap perubahan sikap aparatur desa dalam memandang tata kelola pemerintahan desa. Aparatur desa mulai menyadari bahwa tugas pemerintahan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

berkaitan dengan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran ini menjadi modal penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan desa yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara lebih luas, kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa merupakan investasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu mengelola sumber daya secara lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebaliknya, lemahnya kapasitas aparatur desa dapat menghambat efektivitas pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan desa yang baik juga memiliki hubungan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Administrasi yang tertib, perencanaan yang partisipatif, pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan pilkades yang demokratis merupakan elemen-elemen penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, hasil kegiatan PKM ini menegaskan bahwa sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menuntut aparatur desa untuk terus meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi sangat penting dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, diharapkan desa mampu menjadi institusi pemerintahan yang lebih profesional, transparan, demokratis, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal. Dengan demikian, penguatan manajemen pemerintahan desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai konsep umum manajemen pemerintahan desa berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam aspek administrasi, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta tata kelola pemilihan kepala desa. Melalui pendekatan partisipatif yang mengombinasikan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan PKM masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya tertib administrasi, kurang optimalnya penyusunan dokumen perencanaan desa, keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa, serta minimnya pemahaman terhadap mekanisme pilkades yang demokratis dan sesuai regulasi.

Setelah kegiatan dilaksanakan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap fungsi dan tanggung jawab pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan desa secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya profesionalisme, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan teknis aparatur desa, tetapi juga memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, M. A., & Permana, Y. F. (2024). Analisis pengelolaan keuangan desa studi kasus pada Kantor Desa Mekarmukti Bandung Barat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 105–112. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10346>
- Bancin, M. H. (2011). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (studi kasus: Bandung Barat). *Journal of Regional and City Planning*, 22(3), 179–194. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.3.2>
- Diana, B. A. (2018). Analisis terhadap tata kelola keuangan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.18434>

- Fey, F. (2025). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 8(1), 1519–1524. <https://doi.org/10.55916/frima.v1i8.1030>
- Fuziawan, M. I., Fauzi, L. M., & Wulandari, W. (2025). Pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(3). <https://doi.org/10.36859/jp.v1i3.4001>
- Herdiana, D. (2019). Konstruksi politik identitas melalui nilai-nilai Islam dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(2). <https://doi.org/10.24042/tps.v15i2.5107>
- Madjid, U., & Abidin AS, Z. (2022). Pembangunan partisipasi dan demokrasi lokal di Kabupaten Bandung Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 197–212. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2604>
- Novatiani, R. A., Christina, V., Asikin, B., Sarumpet, T. L., & Novianto, R. A. (2023). Kualitas pengelolaan aset desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (survei pada desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 38–43. <https://doi.org/10.36985/d1n1ay80>
- Prasetyo, F., & Heriyanto. (2025). Implementasi manajemen keuangan dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di Desa Campakamekar). *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 8(1), 318–325. <https://doi.org/10.55916/frima.v1i8.760>
- Subagyo, A., Setiawan, A., Rohayatin, T., Nurdin, I., Septiansyah, B., & Ristala, H. (2021). Kepemimpinan kepala desa dalam rangka tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 2(1), 65–77. <https://doi.org/10.26874/jakw.v2i1.105>